



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDRAYANI**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO HUKUM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**
3. NHK : **649166**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **750.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 527 m2/527 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 524 m2/524 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 804 m2/804 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **17.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VEGA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **222.500.000**

D. SURAT BERHARGA

Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **44.121.682**

F. HARTA LAINNYA

Rp. **----**

Sub Total

Rp. **1.033.621.682**

III. HUTANG

Rp. **500.695.457**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

532.926.225

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.